

**PEMIKIRAN POLITIK MAHATMA GANDHI TENTANG
AHIMSA DAN SATYAGRAHA TERHADAP KEKERASAN
STRUKTURAL DI INDONESIA**

Franky

Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP UNDIP Semarang

Abstract

Structural violence is violence that occurs subtly and is not clearly visible but is resolved by the lives of many people. Such as corruption, religious intolerance, and drug trafficking in the area. Structural violence is often applied by the Indonesian government fully unconsciously through its policies. To overcome this, there is a figure who struggles to understand everything related to all kinds of violence. Gandhi is an anti-violent struggle figure from India who always holds the struggle with non-violent struggle. Gandhi's life was devoted to community service. Gandhi fought various kinds of resistance, including defense which clashed against religion. The purpose of this study was to analyze and rethink Mahatma Gandhi's political thinking against structural defenses consisting of religion in Indonesia.

This study uses descriptive research methods and also literature studies. Type of research literature study is collecting materials in the form of Gandhi's handwriting works and organizing information relating to research. to draw conclusions. In receiving the data, the researcher collects Gandhi's works and also collects works written by others but is still relevant to the research objectives.

The results of the research that has been done, that it improves the politics of Mahatma Gandhi about Ahimsa and Satyagraha has several agreed approvals in supporting the violence that unites religion in Indonesia. Because the politicians have raised policies related to problems in Indonesia. the struggle against which resulted in a victory for anti-violence fighters. Several perspectives and discussions submitted to the Indonesian government are to look back on their views on society, be more open to differences, and actively help the community in structural opposition. Instead it gives legitimacy to structural defense.

Keywords: Satyagraha, Ahimsa, Gandhi, Structural Violence

PENDAHULUAN

Runtuhnya tembok Berlin di Jerman pada tahun 1989 disusul dengan pecahnya Uni Soviet menandakan berakhirnya perang dingin. Masa-masa penuh ketegangan dalam persaingan teknologi, ideologi, dan militer antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang telah melibatkan negara-negara yang terpolarisasi oleh pengaruh kedua ideologi besar yang saling bertentangan tersebut. Berakhirnya perang dingin juga menandakan kemenangan ideologi tunggal Demokrasi Liberal dalam menghadapi pesaing-pesaingnya. Demokrasi Liberal yang dinilai filsuf Idealis Jerman J.W.F Hegel adalah akhir dari sejarah pertarungan ideologi manusia semakin terlihat nyata. Namun kemenangan Demokrasi Liberal atas lawan-lawannya ini tidak mengakhiri peperangan yang selalu menghantui sejarah manusia. Walaupun telah menjadi ideologi yang menghegemoni dunia dengan neo-liberalismenya melalui persebarannya lewat globalisasi, kemenangan suatu ideologi tidak mengakhiri kejahatan manusia atas manusia lewat kekerasan.

Di Indonesia sendiri kondisi perpolitikan tidak lepas dari cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dari awal bergulirnya pemerintahan pada awal

masa orde lama sampai saat ini, era reformasi. Dalam berlalunya masa-masa pemerintahan, orde baru memberikan luka yang cukup dalam kepada bangsa Indonesia. Kekerasan dan cara-cara represif digunakan pemerintah untuk menstabilkan jalannya pemerintahan. Lawan-lawan politik dan kritik-kritik dari grup penekan ditekan dengan sedemikian rupa agar tidak mengganggu stabilitas politik.

Meski orde baru sudah tumbang dan digantikan dengan orde reformasi. Kenyataannya kekerasan masih belum sanggup meninggalkan negara Indonesia ini. Setelah tumbang orde baru, ruang kebebasan yang luas membuat siapapun merayakan kebebasannya. Sebelumnya yang tidak terlihat di orde baru mulai muncul ke permukaan. Media-media bebas menyiarkan apapun. Organisasi-organisasi sosial semakin beragam. Buku-buku yang dilarang sudah bebas dibaca dimana-mana. Sifat dan keberagaman dari beberapa agamapun terus berkembang dan semakin variatif. Ditambah dengan masuknya internet dan revolusi industri 4.0 membuat kebebasan berpendapat tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia virtual. Manusia Indonesia dituntut untuk bijak dalam menghadapi zaman.

Saat ini kekerasan di Indonesia mulai berubah menjadi kekerasan struktural dan intoleransi beragama. Padahal sudah jelas didalam sila kedua Pancasila dan Pasal 29 ayat (2) 1945 menegaskan: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing." Jaminan konstitusional tersebut diperkuat dengan Pasal 28E Ayat (1 & 2) , UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik. Kondisi politik yang memanas turut melambungkan tingkat intoleransi beragama di Indonesia. Beberapa kasus yang sempat disorot media diantaranya penyerangan Gereja di St.Lidwina di Yogyakarta, penyerangan, perusakan, dan pengusiran penganut Ahmadiyah di Lombok Timur, perusakan dua wihara dan lima kelenteng di Tanjung Balai, dan masih banyak lagi kasus lainnya.

Kekerasan agama adalah bukti nyata masalah sosial yang dihadapi Indonesia. Kekerasan yang tadinya hanya struktural dan berlangsung hangat di sosial media dapat menjadi kekerasan langsung di dunia nyata. Kelompok minoritas pun semakin terpinggirkan dengan adanya intimidasi dan alienasi. Jika dibiarkan saja, eskalasi seperti ini akan terjadi terus dan menggerus nilai-nilai bangsa yang sudah

ditanam para pejuang kemerdekaan dahulu. Apabila dibiarkan, pemerintah mempunyai peran dalam munculnya kekerasan struktural maupun langsung yang terjadi.

Apabila kekerasan struktural terus dibiarkan begitu saja terjadi di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan akan memunculkan banyak kekerasan langsung yang semakin marak di Indonesia nantinya. Pemerintah juga menjadi bagian dari pelaku utama bila kondisi ini terjadi. Karena kekerasan struktural mensyaratkan pelakunya yang memiliki kuasa dan kemampuan untuk membantu serta menangani suatu masalah hanya diam membiarkan saja atau malah mendukungnya, maka tidak salah lagi pemerintah sudah menjadi pelaku bagi kekerasan struktural. Permasalahan yang diselesaikan dengan cara-cara kekerasan hanya akan mengakibatkan kekerasan yang lain. Kekerasan tidak pernah berakhir, selalu berulang dalam lingkaran sejarah dan tidak memecahkan masalah. Melihat kebelakang memasuki dekade akhir abad 19 ,saat negara bangsa belum menjadi mainstream seperti sekarang telah lahir sesok manusia yang melihat dunia secara berbeda. Mohandas Karamchand Gandhi atau yang dikenal dengan Mahatma Gandhi yang lahir di India tepatnya tahun 1869. Tidak ada yg istimewa dari Mohandas Karamchand Gandhi, kecuali mungkin bahwa ia memang

benar2 pemalu. Ia tidak memiliki bakat yang luar biasa. Ia menyelesaikan sekolah sebagai murid yang sedikit kurang dari rata-rata : rendah diri dan serius, sangat berbakti kepada orang tuanya, dan hanya tahu samar-samar tentang apapun di luar kota kelahirannya yang hanya tepi laut sepi. Hal-hal inilah yg membuat seorang Gandhi menjadi sosok yang menarik. Ia tidak jauh dari sosok manusia pada umumnya yang tenggelam dalam keluarga dan lingkungan sosialnya.

Dengan semangat dan kegigihan belajar serta keingintahuannya yang tinggi khususnya mengenai pembuktian spiritualnya tentang kebenaran membawanya pada sebuah prinsip hidup yang kelak akan dikenal sebagai sebuah ajaran yang berpengaruh besar dalam perjuangan dan pemikiran politiknya. Gandhi mengatakan bahwa sebenarnya nilai-nilai yang dianut dan harus ditegakkan pada ajarannya sangat sederhana ,namun memerlukan disiplin ketat yaitu Satya(Kebenaran) dan Ahimsa (Pantang Kekerasan). Perjuangan yang dilakukan Rakyat India harus menekankan nilai-nilai universal ini. Tidak boleh menggunakan kekerasan. Ketidakpatuhan untuk menjadi beradab haruslah tulus, terhormat, terkendali, tidak pernah menantang, harus berdasarkan pada prinsip tertentu yang dipahami dengan baik, tidak boleh berubah-ubah, dan

yang paling penting tidak ada sakit hati atau kebencian dibaliknya.

Kehidupan seorang Gandhi merupakan hal yang sangat menarik. Sangat jarang diantara beberapa ratus tahun sekali bisa melihat pejuang yang biasa tapi tidak biasa ini. Bahkan Albert Einstein pernah menulis surat untuknya dan berkata “Generations to come, it may well be will scarce believe that such a man as this one ever in flesh and blood walked upon this Earth”. Sosoknya yang baik dan hangat membuat siapapun nyaman bila ada didekatnya.

Cara - cara yang Gandhi lakukan menghadapi berbagai macam kekerasan dalam hidupnya diatas dengan cara yang lembut dan penuh kasih. Berbagai macam kekerasan struktural yang berupa kolonialisme, sistem kasta dan masalah perundang-undangan pernah ia bela. Metode perjuangan melalui ahimsa dengan gerakan anti kekerasannya menjadi pelopor model gerakan baru pada saat dunia telah mengalami berbagai macam kekerasan yang dihasilkan oleh perang dunia. Ahimsa yang mungkin terkesan utopis saat itu ternyata mampu menjadi cara efektif dalam memperjuangkan ketidakadilan kaum yang termajinalkan oleh penguasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif,

karena penelitian ini akan memecahkan masalah penelitian dengan terlebih dahulu memamparkan keadaan objek bersangkutan yang sedang diteliti, dalam hal ini seseorang untuk kemudian ditelaah dan diproses untuk menghasilkan suatu pembahasan yang berujung pada kesimpulan penelitian. Karena objek yang diteliti berasal dari masa lampau, maka penelitian ini mengikut sertakan instrument-instrumen metode penelitian historis (historical research) yang antara lain bertujuan membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk menyingkap fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Penelitian ini sangat berkaitan erat dengan fakta-fakta sejarah masa lampau, hipotesis-hipotesis dan lain-lain.

Selain itu dalam penelitian ini juga diterapkan studi pustaka (library research) dengan bentuk deskriptif analitis. Studi pustaka adalah suatu bentuk penelitian yang data-datanya diperoleh dari karya-karya atau hasil ide-ide pemikiran tokoh yang menjadi focus penelitian ataupun pustaka lain yang relevan dan berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Anton Bekker, studi kepustakaan yang termaksud dalam rumpun penelitian historis faktual, yaitu bentuk penelitian yang membahas pemikiran orang lain.

PEMBAHASAN

A. Pemikiran Politik Mahatma Gandhi Tentang Satyagraha (Kebenaran)

Satyagraha, berarti berpegang teguh pada kebenaran. Pejuang yang menjalankan Satyagraha disebut dengan Satyagrahi. Dalam tataran praktikal dan politis, seorang Satyagrahi harus menjalani disiplin yang taat. Kesesuaian antara pikiran, kata-kata dan perbuatan harus menjadi acuan dan prinsip utama. Kehidupan yang terintegrasi seperti itu tidak hanya melibatkan menghilangkan semua jejak kemunafikan dan inkoherensi dari jalan seseorang hidup tetapi juga berjuang melawan ketidakbenaran ketika seseorang merasa kuat dan berada dalam posisi untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Jika melenceng sedikit saja, itu akan melukai perjuangan dan menyimpang dari kebenaran, sehingga hasil yang didapatkan pun bersifat sementara. Satyagraha merupakan sebuah kekuatan yang berasal dari kedalaman jiwa manusia, dari setiap hati nurani yang pernah terlahir.

Ada dua kondisi yang cukup menantang Satyagraha untuk menyelesaikannya. *Pertama*, Kebenaran yang dipercayai dan dimiliki setiap orang berbeda-beda. Kebenaran bagi kita bisa saja salah menurut orang lain. Begitu juga sebaliknya, kebenaran bagi orang lain bisa saja salah menurut kita. Karena hal tersebut munculah

kondisi bagaimana cara menyelesaikan kebenaran yang saling berbeda versi ini atau sebagaimana yang Gandhi katakan menyelesaikan dengan cara yang kooperatif. *Kedua*, seorang Satyagrahi tidak memiliki alternatif selain berdiri dan bertarung ketika lawannya menolak untuk berbicara atau untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan dengan hal yang benar atau 'benar' untuk dilakukan situasi yang diberikan. Metode memperjuangkan tujuan, tidak eksternal tetapi bagian integral dari itu. Setiap langkah menuju yang diinginkan tujuannya ditentukan karakternya dan harus menyatu dan menjadi kongruen dengan itu, tidak boleh terdistorsi atau merusaknya proses mencapainya. Tujuannya tidak ada pada akhir serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapainya, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh dari awal. Bagi Gandhi, perbedaan antara cara dan tujuan mengabaikan fakta mendasar dan tidak bisa dipertahankan. Teori Gandhi tentang satyagraha sekaligus bersifat epistemologis dan politik.

Untuk mengatasi kondisi tersebut Gandhi menekankan perlunya dialog dengan diskusi yang rasional. Karena setiap orang mempunyai persepsi masing-masing dalam melihat kebenaran. Dengan adanya dialog kedua subjek yang berselisih akan mengerti kondisi masing-masing dan mulai memahami bagaimana cara terbaik untuk menghadirkan solusi terbaik bagi kebaikan bersama. Dalam menyelesaikan konflik, bagi

Gandhi harus berdasarkan tiga asumsi *Pertama*, karena tidak ada pihak yang memiliki kebenaran mutlak, masing-masing harus memasuki diskusi dengan semangat kerendahan hati dan dengan pikiran terbuka. *Kedua*, karena masing-masing melihat kebenaran berbeda, ia harus melakukan upaya tulus untuk masuk ke alam berfikir lawannya dan menghargai mengapa dia melihat masalah ini secara berbeda. *Ketiga*, diskusi rasional tidak ada gunanya jika pihak-pihak yang berkepentingan mementingkan diri sendiri dan cenderung tidak menyukai atau membenci satu sama lain.

Jadi yang diperlukan dalam menangani suatu masalah dari pihak yang saling bertentangan adalah diturunkannya ego masing-masing pihak, selalu terbuka terhadap kesalahan dan tidak merasa dirinya yang paling benar. Ketika kondisi tersebut tercapai ruang diskusi yang rasional akan berjalan dengan mulus dan bersahabat. Kebenaran yang lebih tinggi akan diraih dengan dipenuhinya kemauan kedua belah pihak tanpa ada rasa benci atau bermusuhan. Tetapi, apabila kondisi tersebut tidak terjadi dan memunculkan kebuntuan, setidaknya dengan hal tersebut dapat membantu kedua pihak bertukar pikiran dan mengerti kondisi masing-masing, sehingga peluang terjadinya kekerasan dan kebencian menjadi lebih kecil.

B. Pemikiran Politik Mahatma Gandhi tentang Ahimsa

Ahimsa bagi Gandhi merupakan hukum dasar bagi hidup manusia. Ahimsa berasal dari kata Sansekerta yang bersumber dari ajaran Buddha. Diartikan sebagai ketiadaan kekerasan atau pantang melakukan kekerasan atau juga nirkekerasan yang dilakukan dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan. Tiada kekerasan bagi Gandhi merupakan perjuangan yang lebih aktif dibanding dengan pembalasan atau penggunaan kekerasan yang sifat dasarnya meningkatkan kejahatan. Ahimsa sendiri terlahir dari berbagai perenungan, pembacaan dan pencarian akan jalan terbaik untuk melakukan suatu perjuangan mencapai Ketuhanannya. Ide-ide dasar ahimsa dapat ditemukan dalam ajaran-ajaran besar agama dunia seperti Kristiani, Hinduisme, Jainisme, Muslim, dan Buddhisme. Beberapa juga terinspirasi dari karya-karya penulis barat seperti Tolstoy dan Ruskin.

Ahimsa dapat digunakan sebagai prinsip paling efektif untuk tindakan sosial, karena secara mendalam sesuai dengan kebenaran sifat alami manusia dan sesuai dengan keinginan bawaannya akan perdamaian, keadilan, ketertiban, kebebasan dan martabat pribadi. Himsa(kekerasan) merendahkan dan merusak manusia, maka menghadapi kekerasan dengan

kekerasan dan kebencian akan menambah parahnya kemerosotan secara progresif dari manusia. Nirkekerasan, kebalikannya, menyembuhkan dan memulihkan sifat alami manusia sembari memberikan kepadanya sarana bagi penyembuhan serta pempugaran ketertiban dan keadilan sosial. Ahimsa bukan suatu kebijakan untuk merebut kekuasaan. Ahimsa merupakan jalan untuk mengubah hubungan-hubungan agar terlaksana peralihan kekuasaan secara damai, dilakukan dengan sukarela tanpa desakan semua yang bersangkutan oleh karena semuanya mengakuinya sebagai hak.

Ahimsa mensyaratkan suatu aksioma dalam pelaksanaannya, beberapa diantaranya yaitu :

1. Ahimsa mensyaratkan pemurnian dan pensucian diri sesempurna mungkin yang bisa diraih secara manusiawi.
2. Kekuatan ahimsa terletak pada kemampuan dan kerelaan, bukan hanya kemauan.
3. Ahimsa pasti mengungguli kekerasan. Kekuatan yang lahir dari penganut ahimsa selalu lebih besar daripada kekuatan yang dihasilkan penganut kekerasan
4. Ahimsa tidak mengenal kekalahan.

5. Muara akhir dari ahimsa adalah kemenangan yang pasti, jika istilah menang ini mungkin diterapkan dalam ahimsa. Sesungguhnya, ketika tidak memikirkan kekalahan, maka juga tidak diperlukan kemenangan.

Ahimsa bukan merupakan hal baru, ia sudah ada dalam ajaran-ajaran besar agama-agama besar dunia dan yang paling dekat dengan diri manusia sendiri, yaitu hati nurani manusia. Ahimsa mensyaratkan kondisi ketika semua kekerasan hilang dari hati manusia, keadaan yang tersisa adalah kasih sayang. Ahimsa bukanlah sesuatu yang diluar diri manusia, ia selalu ada didalam lubuk hati manusia, menunggu untuk didengarkan dan dipilih, ia selalu hadir, dan hanya perlu ditemukan. Ahimsa merupakan sifat dasar manusia. Bentuk ahimsa tertinggi adalah ketika manusia dapat mengasihi musuhnya atau seorang yang ia benci. Lebih tinggi ketika tidak dapat menemukan musuh dan kebencian dalam dirinya. Ahimsa akan optimal apabila sang pelaksana melakukan pemurnian diri. Gandhi sendiri selalu melakukan puasa dan ikrar Brahmacharya.

C. Kekerasan Struktural di Indonesia

Kekerasan struktural yang terjadi di Indonesia memiliki bentuk yang bermacam-macam. Dimulai

dari penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan kekerasan beragama. Kekerasan beragama di Indonesia tidak terlepas dari intoleransi beragama yang meningkat belakangan tahun terakhir ini. Apalagi setelah terjadinya Pilkada Jakarta pada tahun 2014. Setelah momen mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahya Purnama dipidana dalam kasus penodaan agama yang kebetulan berasal dari kelompok minoritas.

Berdasarkan laporan tersebut, indeks demokrasi di Indonesia memperlihatkan tren menurun dari 2014 hingga 2017. Pada 2014, tercatat nilai indeks sebesar 6,95 dan naik menjadi 7,03 pada 2015. Namun, angka ini terus turun menjadi 6,97 pada 2016 dan turun sangat signifikan di 2017 dengan skor 6,39. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara dengan performa terburuk pada 2017, turun 20 peringkat dari ranking ke-48 menjadi 68 di tingkat global.

Ditengah kondisi politik yang semakin memanas dalam Pemilihan Presiden 2019 Jakarta masih diselimuti oleh rendahnya intoleransi yang diawali dari Pilkada Jakarta hingga saat ini. Pemimpin politik mempunyai peran sentral dalam menanggulangi masalah tersebut.

Fenomena kekerasan struktural pemerintah dalam kekerasan beragama dapat dilihat dari beberapa kasus yang

memperlihatkan adanya ketidakhadiran negara dalam mendinginkan suatu konflik atau mencegah adanya situasi konflik. Jamaah Ahmadiyah Indonesia merupakan organisasi yang secara resmi terdaftar dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.JA 5/23/13 tanggal 13 maret 1953, Tambahan Negara Republik Indonesia No.26 tanggal 31 Maret 1953. Dalam sejarahnya, pengikut Ahmadiyah terus menjadi sasaran kekerasan dan pengusiran karena dianggap mengamalkan dan menyebarkan ajaran agama sesat. Dalam catatan ELSAM, kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah mulai muncul pada tahun 2001 ketika terjadi perusakan rumah dan masjid hingga pembunuhan terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Sambi Elen, Nusa Tenggara Barat. Sejak saat itu kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah frekuensinya terus meningkat.

Kasus terbaru terjadi pada 20 Mei 2018, puluhan jamaah Ahmadiyah terusir dari rumahnya sendiri saat sekelompok orang melakukan tindakan pengrusakan terhadap rumah mereka di Desa Gereng, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat. 24 orang penganut Ahmadiyah di desa itu di evakuasi oleh polisi ke Kantor Polres Lombok Timur dan masih menginap di Kantor Polres Lombok Timur.

Kondisi ini menunjukkan bahwa di rezim demokrasi pun masih ada kekerasan structural melalui tindakan pemerintah yang membiarkan atau malah melegitimasi kekerasan structural. Padahal sudah jelas didalam sila kedua Pancasila dan Pasal 29 ayat (2) 1945 menegaskan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing.” Jaminan konstitusional tersebut diperkuat dengan Pasal 28E Ayat (1 & 2) , UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik.

D. Analisa Pemikiran Politik Mahatma Gandhi tentang Ahimsa dan Satyagraha Terhadap Kekerasan Struktural di Indonesia

“Berbeda dengan kekerasan pribadi kuno, kekerasan besar itu nyaris tidak terlihat. Itu tersembunyi di belakang jalinan aturan, tidak pernah dipamerkan secara kasar tetapi tidak pernah secara halus ditampilkan secara berkala, resmi sehingga tidak spesifik individu dapat disalahkan karena melakukan itu, dibagi untuk mengelolanya atas nama negara agar warganya tidak pernah memahami skala besarnya. Semua ini menciptakan ilusi berbahaya bahwa negara modern telah menghilangkan kekerasan

padahal sebenarnya telah meningkat.”

Kutipan dari Gandhi tersebut menunjukkan bentuk kekerasan pada zaman modern lebih halus dan tidak mudah dilihat dengan adanya kekerasan struktural. Seperti apa yang didefinisikan oleh Johan Galtung yang juga terinspirasi dari hidup Mahatma Gandhi tentang kekerasan. Kekerasan struktural saling terkait dengan kekerasan langsung.

Pada kasus Ahmadiyah terlihat pemerintah membiarkan kekerasan terjadi, sehingga terus berulang dan merugikan kelompok minoritas. Malah justru melegitimasi diskriminasi dan kekerasan struktural pada kelompok minoritas. Hal itu terbukti dengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 dan Nomor 199 Tahun 2008. Surat Keputusan Bersama ini memperingatkan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok ajaran Islam.

Dalam prakteknya ternyata ada keputusan dalam peradilan yang tidak adil, Menurut Elsam. Pada 6 Februari 2011, massa menyerang warga Ahmadiyah di Cikeusik, Banten. Akibatnya, 3 warga

Ahmadiyah tewas, 6 orang luka berat. Seorang korban di hukum selama 6 bulan penjara sementara 12 pelaku justru mendapatkan hukuman yang lebih ringan yaitu 3 – 6 bulan penjara. Kekerasan ini memicu banyak kekerasan lain yang terjadi pada jamaa Ahmadiyah di banyak daerah lain.

Gandhi dalam pemikiran politiknya tentang Satyagraha memiliki pandangan bahwa dalam bernegara baiknya melihat manusia sebagai manusia yang memiliki percikan Tuhan dalam setiap orang. Sehingga, serendah apapun orang itu harus dipandang dan diperlakukan secara manusiawi. Dalam menyelesaikan konflik Gandhi memiliki beberapa dasar yang harus dilakukan dalam Satyagraha. *Pertama*, setiap orang harus memasuki diskusi dalam keadaan pikiran terbuka dan kerendahan hati karena tidak ada kebenaran mutlak. *Kedua*, setiap orang harus mengurangi egonya dan mencoba saling memahami. *Ketiga*, untuk menghadirkan dialog yang rasional dan objektif selayaknya masing-masing tidak boleh berprasangka terlebih dahulu dan membenci satu sama lain.

Dalam konteks kasus yang terjadi, seharusnya pemerintah dapat membuka ruang dialog dengan orang-orang yang berkonflik apabila ingin menghasilkan suatu kebijakan yang baik. Kebijakan yang mencapai

kebenaran bersama bagi semua pihak. Pemerintah harus memandang masyarakatnya secara manusiawi, bukan hanya memandang sebagai produk penghasil kekuasaan. Selama kelompok-kelompok tersebut tidak melakukan kekerasan dan selalu berada dalam lingkup konstitusi.

Pembiaran dan legitimasi yang diberikan menmemberikan dampak buruk bagi kelompok minoritas. Kekerasan structural mulai berubah menjadi kekerasan langsung seperti contoh Ahmadiyah. Yang seharusnya negara meberikan perlindungan kepada warga negaranya justru malah berbalik merugikan warga negaranya. Jemaah Ahmadiyah berstatus resmi warga negara. S ebagai warga negara, mereka wajib membayar pajak, mematuhi hukum, mengikuti anjuran pemerintah. Mereka tidak boleh menghadapi kekerasan dengan kekerasan, dan mesti menyerahkannya kepada hukum yang berlaku

Namun kepatuhan dan ketaatan itu tidak selalu diganjar dengan tindakan nyata negara untuk melindungi hak-hak mereka. Dengan alasan keadaan darurat atau untuk mengantisipasi reaksi keras lanjutan dari kelompok yang mengaku diri mayoritas, negara cenderung membiarkan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Negara sering menerapkan kebijakan utilitaristis. Yakni

kebijakan yang cenderung membenarkan ketidakadilan terhadap kaum minoritas untuk menghindari reaksi negatif dari kelompok mayoritas.

Kebijakan pemerintah sangat bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip yang dianut oleh Gandhi serta pandangan politiknya. Pandangan Gandhi berazaskan Satyagraha dan Ahimsa yang menekankan adanya dialog dan saling menghormati dan menghargai sesama manusia yang sebagian dirinya merupakan percikan Tuhan. Maka dari itu, diperlukannya kembali nilai-nilai ketimuran yang sudah ada dalam tubuh Bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Ketika nilai-nilai ini kembali ditegakkan , Gandhi pun ikut bersuara bersama pendiri-pendiri bangsa untuk membela semua pihak untuk kebaikan bersama.

KESIMPULAN

Kekerasan struktural adalah kekerasan yang mempengaruhi hidup orang banyak tetapi tidak terlihat secara langsung dan memberikan dampak secara nyata terhadap kehidupan banyak orang. Contoh kekerasan struktural seperti misalnya korupsi, peredaran narkoba di lapas, pembiaran intoleransi beragama dan lain-lain. Kekerasan struktural di Indonesia memberikan dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat. Bisa dilihat dari menurunnya tindkat toleransi dan demokrasi di Indonesia yang

disebabkan pilihan politik lalu menjalar ke berbagai identitas.

Pemerintah dapat menjadi pelaku kekerasan struktural karena memiliki kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi hidup orang banyak. Menurut Galtung, sengaja atau tidak sengaja apabila menghasilkan kekerasan struktural itu berarti sama saja melakukan kekerasan karena dilihat dari sudut pandang korbannya. Kekerasan struktural yang bertransformasi menjadi kekerasan langsungpun tak dapat di hindarkan. Jemaah Ahmadiyah Indonesia merupakan salah satu contohnya. Masih ada lagi kasus Tanjung Balai, penyerangan Gereja, Terorisme, dan berbagai kasus lainnya. Semuanya memerlukan kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Tetapi apa yang dilakukan pemerintah justru melanggengkan kekerasan dan mengeluarkan kebijakan yang tidak solutif. Karena tertutup dan tidak membuka kesempatan dialog, sehingga hanya mendewakan kebenaran persepsinya.

Menilik pada sejarah, pada zaman kolonialisme dahulu ada sosok yang pemikiran dan ide-idenya tidak lekang oleh zaman dapat membantu merubah sudut pandang atau menangani masalah tersebut. Adalah seorang Mahatma yang berjiwa besar bernama Gandhi. Pemikirannya yang orisinal dan jujur berhasil menarik perhatian

dunia dan membebaskan negaranya dari penjajahan tanpa melakukan peperangan.

Indonesia dapat belajar dari Gandhi tentang bagaimana membangun sebuah bangsa yang tidak hanya berdasarkan hasrat untuk merdeka. Tetapi juga memebangkitkan nilai-nilai yang tertanam dan membangun kepercayaan diri bangsa. Gandhi menekankan nasionalisme ketimuran yang mempunyai sifat religius dan anti kekerasan.

Pemikirannya tentang kebenaran dan anti kekerasan harusnya cocok diadopsi oleh Indonesia. Karena pemikiran tersebut lahir dari beragam dan banyaknya perbedaan juga. Bagi Gandhi, kebenaran adalah tujuan utamanya. Maka dari itu yang ia bisa ajarkakan untuk Indonesia adalah metodenya dalam menghadapi suatu masalah. Metodenya menitikberatkan pada kekuatan jiwa manusia. Bahwa manusia harus dipandang sebagai manusia yang unik dan mempunyai percikan Tuhan didalam tubuhnya. Pemecahan masalah dengan tanpa kekerasan adalah andalannya. Bahwa suatu kebijakan yang baik harus bersumber pada kebenaran yang harus membuka diri. Tidak terutup pada pandangan kebenaran sendiri. Berdialog dengan kerendahan hati dan tanpa prasangka untuk mendapatkan kebenaran bersama. Melakukan sesuatu dengan integritas

dan harus sesuai garis lurus pikiran,ucapan dan perbuatan.

Pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan misalnya hanya untuk menyengankan banyak orang ataupun hanya menyenangkan orang kaya. Pemerintah harus adil

Referensi Buku

Eknath Easwaran. 2013. *Gandhi the Man*. Yogyakarta:Bentang.

Mahatma Gandhi. 2009. *Semua Manusia Bersaudara*. Jakarta:Yayasan Obor Jakarta.

M.K.GAndhi. 2009. *Mahatma Gandhi Sebuah Autobiografi*. Yogyakarta:Narasi.

Louis Fischer. 1967. *Gandhi Penghidupan dan Pesannya untuk Dunia*. Jakarta:P.T.Pembangunan.

Martin Suryajaya. 2016. *Sejarah Pemikiran Politik Klasik:dari Prasejarah hingga Abad ke-4 M*. Serpong:Marjin Kiri.

Bhikhu Parekh. 1989. *Gandhi's Political Philosophy*. London: Macmilan Academic adn Professional LTD.

Marsana Windhu. 1992. *Kekuasaan dan kekerasan menurut Johan Galtung*. Kanisius : Yogyakarta.

Vad Metha. 2011. *Ajaran-ajaran Mahatma Gandhi*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Robert Ellsberg. 1991. *Gandhi on Christianity*. LKiS: Yogyakarta.

membuat kebijakan untuk menyenangkan semua orang. Gandhi menentang kebijakan utilitarianisme. Maka dari itu untuk menghadapi kekerasan struktural harus adanya integrasi antara pikiran, ucapan dan perbuatan.

M.K.Gandhi. 1915. *Unto This Last*. Navajivan Publishing House : Ahmedabad.

M.K.Gandhi. 1958. *The Collected Works of Mahatma Gandhi*. Divisi Publikasi Pemerintah India : New Delhi.

Francis Alappatt. 2005. *Mahatma Gandhi: Prinsip Hidup,Pemikiran Politik dan Konsep Ekonomi*. Nusamedia :Bandung.

Martin Green. 1958. *The Origins of Non-violence*. Navajivan Publishing House : Ahmedabad.

B. Srinivasa Murthy. 1987. *Mahatma Gandhi and Leo Tolstoy Letters*. Long Beach Publications : California.

Thomas Merton. 1990. *Gandhi tentang Pantang Kekerasan*. Yayasan Obor: Jakarta.

M.K. Gandhi.2001. *My Non - violence*. Navajivan Publishing House: Ahmedabad.

Dalam Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*.Bandung : Alfabeta,2008.

Sumardi Suryabrata. 1998. *Metodologi Penelitian*. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Mestika Zed. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.

Agus Sudibyo. 2019. *Demokrasi dan Kedaruratan: Memahami Filsafat Politik Giorgio Agamben*. Marjin Kiri: Serpong.

Referensi Internet

Warih Anjari, "*Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*", E-Journal WIDYA Yustisia Volume 1 Nomor 1 April 2014.

<https://tirto.id/benarkah-intoleransi-antar-umat-beragama-meningkat-cEPz>
di download pada 19 juni 2019